

Intervensi Komunitas: Mewujudkan Perubahan Sosial Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) “Wono Mulyo” Menuju Kemandirian Lembaga

Diah Puspaningrum^{1*} dan Ati Kusmiati²

¹ Universitas Jember; puspafauzan38@gmail.com

² Universitas Jember; ati.faperta@unej.ac.id

* Correspondence: puspafauzan38@gmail.com; Tel.: 083852153679

Abstract: *Community empowerment approach should play role in improving human resources especially in establishing and changing the community behaviour to achieve more quality living standard. The research aimed to participatory develop the capacity of Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) (Conservation Forest Village Community Institution) “Wonomulyo” through institutional social change in realizing institutional independence. The research used qualitative approach with subject emancipation research approach. Location determination method was conducted using purposive method, which was at Wonoasri Village, Tempurejo Sub-district, Jember Regency, East Java Province. Data source in the research was words and actions of the key informants/stakeholders consisted of the administrators and members of the Conservation Forest Village Community Institution as well as rehabilitation land farmers. Data collection obtained primarily from the result of observation, in-depth interview, and focus group discussion (FGD) as well as PRA (Participatory Rural Appraisal) method to conduct institutional development. Data analysis used interactive model from Miles and Huberman. The research results found that community intervention program on Conservation Forest Village Community Institution was conducted through participatory research. The capacity building of LMDHK “Wono Mulyo” was conducted through self-learning process and building independent initiatives. Therefore, independence development was a form of social change of human beings from a situation that depended on aid to become more independent based on initiatives and creativities of the local communities.*

Keywords: *Community Intervention; Social Change; Institutional Independence*

Abstrak: Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam membangun dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai standar hidup yang lebih berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk secara partisipatif mengembangkan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) “Wonomulyo” melalui perubahan sosial kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian emansipasi subjek. Metode penentuan lokasi dilakukan dengan menggunakan metode purposive, yaitu di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan informan / pemangku kepentingan utama yang terdiri dari administrator dan anggota Lembaga Komunitas Desa Hutan Konservasi serta petani lahan rehabilitasi. Pengumpulan data diperoleh terutama dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok fokus (FGD) serta metode PRA (Participatory Rural Appraisal) untuk melakukan pengembangan kelembagaan. Analisis

data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa program intervensi masyarakat pada Lembaga Komunitas Desa Hutan Konservasi dilakukan melalui penelitian partisipatif. Pengembangan kapasitas LMDHK "Wono Mulyo" dilakukan melalui proses belajar mandiri dan membangun inisiatif independen. Oleh karena itu, pengembangan kemandirian adalah bentuk perubahan sosial manusia dari situasi yang bergantung pada bantuan untuk menjadi lebih mandiri berdasarkan inisiatif dan kreativitas masyarakat lokal.

Kata kunci: Intervensi Komunitas; Perubahan sosial; Kemandirian Institusional

1. Pendahuluan

Pemberdayaan sebagai proses transformasi hubungan sosial ekonomi masyarakat di daerah penyangga dengan kawasan konservasi. Pemberdayaan masyarakat desa di daerah penyangga, meliputi: i) Upaya membangunkan daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan; ii) Upaya memperkuat daya masyarakat dengan menyediakan berbagai input seperti dana, sarana-prasarana dan membuka akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya (Anonim, 2015). Sedangkan menurut Kartodihardjo (2006) bahwa pembuatan kebijakan kehutanan aspek kelembagaan dan politik lokal belum ditetapkan sebagai masalah. Pendekatan dalam penyusunan kebijakan kehutanan selalu berangkat dari sisi fisik kayu, hutan dan material lainnya, sebaliknya kurang memperhatikan subyek yang diatur, seperti swasta, individu, kelompok masyarakat dan lain lain serta kepentingan dan kemampuannya.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas (Karsidi, 2002). Menurut Nasrul (2012) Kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (*diversity*). Pemberdayaan merupakan program jangka menengah dan panjang, berkesinambungan dan utuh dan tercapai masyarakat yang mandiri. Hasil dari kegiatan pemberdayaan tidak boleh diukur dari indikator-indikator ekonomi dan dapat tercapai dalam waktu yang singkat. Namun hendaknya diukur dengan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi lebih partisipatif dan mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah secara partisipatif untuk mengembangkan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi "Wonomulyo" dengan melalui perubahan sosial kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian lembaga.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian emansipasi subyek (Kusnaka dan Harry Hikmat, 2003). Pendekatan penelitian emansipasi diperlukan untuk memberdayakan penelitian, bertukar pikiran tentang tujuan metode, kesimpulan dan aspek-aspek lainnya dalam keseluruhan proses penelitian dengan cara-cara dialogis dan interaktif. Penggunaan istilah emansipasi menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh atas perspektif informan dan adanya

keterlibatan informan dalam membangun ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan bersama-sama dengan informan.

Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* (metode secara sengaja) yaitu di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari *key informant/stakeholder* yaitu berasal dari pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) dan petani lahan rehabilitasi Menurut Bungin (2003). Pemilihan informan kunci (*key informant*) dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu orang-orang yang mengetahui dan memahami masalah-masalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap organisasi komunitas.

Data primer yang dikumpulkan terkait dengan penggalian informasi dengan melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait bagaimana melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan meningkatkan kekuasaan mereka dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber tertulis, foto, dokumentasi yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Meru Betiri.

Pengumpulan data diperoleh secara primer dari hasil observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan Focus Group Discussion (FGD) serta metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) untuk melakukan pengembangan kelembagaan (*Institutional Development*) atau pembinaan kelembagaan (*Institutional Building*) melalui proses memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia dengan keuangan yang tersedia.

Sebagai penguji keabsahan data melalui triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber berbeda dan triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda, (Aman, 2011). Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992) untuk menjamin validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian dapat juga digunakan teknik informan review atau umpan balik dari informan.

Dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang sifatnya partisipatif, akan diperoleh informasi yang kaya, karena dengan PRA informan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan informasi yang dimiliki. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, 1992. Langkah-langkah analisis data mulai dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Analisis dan Pembahasan

Intervensi komunitas menurut Mayo (1994) terdapat tiga tingkatan yang menggambarkan cakupan komunitas yang berbeda yaitu: 1) *Grass Root* ataupun *Neighbourhood Work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut mis: Kelurahan atau Rukun tetangga); 2) *Local Agency* dan *inter agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi di tingkat lokal, bersama pemerintah serta organisasi non pemerintah); 3) *regional* dan *national community Planning Work* (pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang lebih luas di tingkat lokal). Adapun dalam kasus ini

adalah intervensi komunitas yang dilakukan terhadap organisasi di tingkat lokal yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) "Wono Mulyo" yang berada di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Pengertian komunitas menurut Kenneth Wilkinson dalam Green dan Haines (2002), komunitas sekurang-kurangnya mempunyai tiga unsur. Yaitu: 1) Adanya batas wilayah atau tempat (*territory or place*); 2) merupakan suatu organisasi social (*social institution*) yang menyediakan kesempatan untuk warganya agar melakukan interaksi; 3) interaksi sosial yang dilakukan terjadi karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama (*common interest*). Pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan dari kondisi yang tidak diharapkan menuju kondisi yang semakin sejahtera. Proses perubahan tersebut berbasis pada dinamika internal masyarakat sendiri, yang didasari keinginan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Perubahan tersebut didorong oleh kesadaran masyarakat akan kondisi kehidupannya yang tidak diharapkan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera yang didambakan (Soetomo, 2014). Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak akan optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut yaitu kewenangan dan kapasitas (Soetomo, 2013). Menurut Tampubolon (2001) bahwa proses pemberdayaan ini meliputi:

Getting to know the local community;

Mengetahui karakteristik LMDHK "Wono Mulyo" termasuk yang membedakannya dengan lembaga masyarakat desa lainnya.

Gathering Knowledge about the Local Community;

Mengumpulkan informasi terkait dengan kekuatan maupun kelemahan yang merupakan faktor internal lembaga dan peluang serta ancaman yang berasal dari luar lembaga.

Identifying the local Leaders;

Pengaruh kepemimpinan lembaga sangat kuat dalam menentukan tercapainya kapasitas lembaga; Perlu dilakukan identifikasi kepemimpinan dalam lembaga.

Stimulating the Community to Realize that it has problem;

Adakalanya masyarakat tidak merasakan bahwa mereka memiliki masalah yang harus diselesaikan. Dalam hal ini Lembaga perlu disadarkan bahwa mereka memiliki masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Helping People to Discuss Their Problem;

Merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya dan merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

Helping People to Identify Their Most Pressing Problems;

Agar masyarakat mampu mengidentifikasi adanya permasalahan yang paling menekan dan masalah yang paling menekan itulah yang harus dicarikan pemecahannya.

Fostering Self Confidence;

Tujuan utama pemberdayaan adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat yang berswadaya.

Deciding on a Program Actions;

Masyarakat perlu belajar untuk menetapkan suatu program kegiatan yang berdasarkan skala prioritas program. Program yang skala prioritasnya tinggi yang perlu dilaksanakan.

Recognition of Strengths and Resources;

Masyarakat perlu mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

Helping People to Continue to Work on Solving their Problems;

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja menyelesaikan masalahnya secara kontinu.

Increasing People's Ability for Self Help

Salah satu tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menolong diri sendiri.

Dilihat dari sisi masyarakat lokal, proses pemberdayaan seringkali mempresentasikan hubungan antara pihak eksternal yang berusaha memberikan sentuhan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat komunitas lokal dan pihak internal atau masyarakat lokal itu sendiri. Pihak eksternal tersebut dapat berasal dari lembaga pemerintah, LSM, atau pihak swasta. Apabila pendekatan pemberdayaan yang digunakan, maka apa yang mereka lakukan sebetulnya harus ditempatkan sebagai bagian dari proses mengembangkan kapasitas masyarakat (*enabling process*) dan proses yang semakin memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan masa depannya (Soetomo, 2013). Sedangkan tahapan perubahan sosial kelembagaan LMDHK Wono Mulyo dalam mewujudkan kemandirian lembaga dilakukan menurut Rukminto (2012) adalah sebagai berikut:

Tahap Assessment

Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan=*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumberdaya yang dimiliki lembaga dalam komunitas masyarakat desa penyangga. Dalam analisis kebutuhan ini ada berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan *assessment* diantaranya adalah analisis SWOT untuk melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), Peluang (*opportunity*), dan ancaman (*Threats*). Dalam proses *assessment* ini masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan masalah yang sedang dirasakan. Pengkajian *assessment* pada masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh-tokoh masyarakat (*community leader*) ataupun anggota masyarakat tertentu, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok (*Focus group discussion*). Pada tahap ini peneliti bersama LMDHK Wono Mulyo mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan=*felt needs*) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga. Permasalahan yang keluar dari mereka benar-benar dari pandangan mereka sendiri adalah berkenaan dengan kapasitas kepengurusan lembaga yang masih lemah. Berdasarkan *felt needs* masyarakat sendiri maka perlu dilakukan pergantian pengurus karena pengurus yang lama "kocak kacir". Disamping itu kepengurusan telah habis masa kerjanya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Pak Tamin sebagai berikut:

3.1 Masalah kelembagaan yang terutama, untuk masalah-masalah yang lain mengikuti. akan mengajukan draft pengurus yang baru kepada TNMB.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka masyarakat mengidentifikasi bahwa permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah terkait dengan kepengurusan lembaga. Sedangkan masalah yang lain bisa diselesaikan kemudian. Setelah itu akan dilakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LMDHK. Pada tahap ini memfasilitasi masyarakat untuk

menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya yaitu pada tahap perencanaan.

1. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Pada tahap ini peneliti secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Berdasarkan analisis SWOT banyak sekali alternative program berdasarkan kekuatan dan kelemahan sumberdaya lembaga berikut peluang dan ancaman dari eksternal. Beberapa alternative program dengan strategi WO adalah sebagai berikut: 1) Segera membentuk kepengurusan yang baru untuk meningkatkan kepemimpinan lembaga; 2) Meningkatkan modal sosial (kepercayaan, nilai dan norma, kerjasama) diantara anggota dan pengurus LMDHK; 3) Meningkatkan daya kreativitas dan partisipasi baik pengurus dan anggota terhadap kegiatan dan program pemberdayaan; 4) Meningkatkan SDM pengurus dan anggota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan; 5) Komunikasi perlu dijalin secara intens antara pengurus dan anggota. Program dan kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mewujudkan kemandirian masyarakat desa penyangga. Dalam proses ini peneliti bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dengan keterbatasan waktu dan biaya dengan cara mempertimbangkan beberapa sumberdaya yang ada. Perencanaan program perlu diusahakan untuk memenuhi kriteria SMART yaitu:

Simple : mudah dipahami oleh masyarakat

Measurable : terukur secara kualitatif

Achievable : dapat dicapai

Realistic : dapat dikerjakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia

Time related : dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perencanaan program adalah dengan membentuk kepengurusan yang baru dan pelatihan kepada pengurus dan Ketua Kelompok Tani Lahan Rehabilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas LMDHK Wono Mulyo.

2. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini peneliti membantu LMDHK untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa saja guna mengatasi masalah yang ada. Dalam tahapan ini diharapkan peneliti dan masyarakat menentukan perencanaan program adalah: 1) Segera membentuk kepengurusan yang baru untuk meningkatkan kepemimpinan lembaga; dan 2) Meningkatkan SDM pengurus dan anggota dengan melakukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan;

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi Program)

Pada tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan jika tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan/peneliti dengan masyarakat desa penyangga. Pertentangan antar kelompok dalam masyarakat dapat juga menghambat pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

Dalam implementasi program telah berhasil dibentuk kepengurusan LMDHK Wono Mulyo yang baru dengan struktur sebagai berikut:

Ketua 1 : P Rahem

Ketua 2 : P Jumani

Sekretaris 1 : P Dasar
 Sekretaris 2 : P Yatno
 Bendahara : P Tamin

Dilakukan pelatihan “Pengembangan Kapasitas LMDHK “Wono Mulyo” dalam Mewujudkan Kemandirian Lembaga. Dalam pelatihan ini diperkenalkan norma norma dan nilai nilai baru dalam lembaga sehingga diharapkan dapat melakukan perubahan sosial pada level individu, level kelompok yang pada akhirnya dapat meluas pada level komunitas atau masyarakat desa peyangga.

4. Monitoring Dan Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan peneliti (*community worker*) terhadap program atau kegiatan yang sedang berjalan pada pengembangan kapasitas kelembagaan sebaiknya melibatkan masyarakat karena keterlibatan masyarakat pada tahap ini akan membentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat akan dapat membentuk masyarakat yang lebih “mandiri” dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

5. Indikator Evaluasi

Feurstein dalam (Rukminto, 2012) mengajukan beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan dalam tahap pengembangan kapasitas kelembagaan LMDHK Wono Mulyo yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Evaluasi Program Intervensi Komunitas

No	Indikator	Ketercapaian
1.	Indikator ketersediaan (<i>Indicators of Availability</i>)	Unsur untuk melakukan pengembangan ada yaitu pengurus, anggota LMDHK. Peneliti sebagai fasilitator, dan Power Holders yaitu Taman Nasional Meru Betiri
2.	Indikator Relevansi (<i>Indicators of Relevance</i>)	Program pelatihan pengembangan kapasitas terhadap pengurus dan anggota telah tepat untuk kondisi kapasitas lembaga yang lemah
3.	Indikator Keterjangkauan (<i>Indicators of Accessibility</i>)	Program ini terjangkau untuk LMDHK
4.	Indikator Pemanfaatan (<i>Indicators of Utilisation</i>)	Program pelatihan dimanfaatkan oleh pengurus & anggota LMDHK dalam upaya untuk meningkatkan kapasitasnya
5.	Indikator Cakupan (<i>Indicators of Coverage</i>)	Program pelatihan dapat diakses hanya sebatas pengurus dan Ketua Kelompok Tani Rehabilitasi
6.	Indikator Kualitas (<i>Indicators of Quality</i>)	Program pelatihan terhadap pengurus dan ketua kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu mewadahi segala kegiatan dan meningkatkan inovasi dan kreatifitas lembaga
7.	Indikator Upaya (<i>Indicators of Efforts</i>)	Upaya intervensi sudah banyak dilakukan baik oleh TNMB sendiri, pemerintah maupun berbagai pihak. Kedepannya upaya tidak hanya berasal dari eksternal tetapi harus ada dari lembaga sendiri sehingga tidak menimbulkan ketergantungan
8.	Indikator Dampak (<i>Indicators of Impact</i>)	Diharapkan program pelatihan ini dapat memberikan stimuli atau rangsangan buat pengurus pada khususnya dan anggota serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kemandirian lembaga

Sumber: Data Mentah Diolah, 2018

Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang telah dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi perbaikan suatu program atau kegiatan yang telah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan peneliti (*community development*) bersama masyarakat bukan saja dilakukan untuk mengevaluasi hasil perubahan akan tetapi juga dilakukan untuk melihat proses intervensi yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan LMDHK Wono Mulyo sebagai salah satu lembaga masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pada tahap ini dilakukan **stabiliasasi** terhadap perubahan yang telah terjadi. Bila sistem ini sudah **terpolakan dan terinternalisasi** pada sebagian besar kelompok masyarakat, dapat diharapkan perubahan yang terjadi akan dapat menjadi relatif menetap.

6. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Terminasi dilakukan karena bukan masyarakat sudah dapat dianggap “mandiri” tetapi karena program atau kegiatan yang dilakukan sudah harus dihentikan karena sudah habis jangka waktu penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan karena keterbatasan biaya penelitian.

Proses pemberdayaan seharusnya menghasilkan praktik sosial baru yang menjadi rutinitas baru dan terpola serta terlembagakan, dengan demikian telah menghasilkan institusi baru dalam pengertian sebagai *institution*. Prasyarat bagi semakin tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan adalah terjadinya proses institusionalisasi. Hal itu disebabkan karena institusionalisasi berdampak pengembangan kapasitas masyarakat sekaligus berkelanjutan. Apabila kondisi itu dapat terwujud, maka akan lebih ada jaminan bahwa berbagai aktivitas masyarakat akan tetap berlangsung walaupun fasilitasi dari pihak eksternal sudah dihentikan (Soetomo, 2013). Menurut Zubaedi (2013) prinsip pemberdayaan adalah mewujudkan kemandirian.

Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumberdaya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis, alam dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui program pengembangan masyarakat diupayakan agar para warga mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat semaksimal mungkin. Menurut Agusta et al (2014) kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi komunitas/masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Untuk itu, apabila masyarakat diberi bantuan dana, maka bantuan itu perlu disikapi sebagai stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri. Membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat.

Proses pengelolaan pembangunan oleh masyarakat sendiri dan tindakan bersama untuk peningkatan kehidupan bersama yang merupakan rutinitas kemudian akan diakui keberadaannya, dirasakan manfaatnya dan ditempatkan sebagai bagian dari pola tindakan bersama. Dengan perkataan lain mekanisme pengelolaan pembangunan oleh masyarakat tersebut sudah terinstitusionalisasi, karena sudah ditempatkan sebagai bagian dari pranata sosial. Oleh karena sudah menjadi bagian dari pranata sosial, maka proses dan mekanisme tersebut akan tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat,

terlepas ada atau tidak ada stimuli eksternal. Dengan demikian yang terjadi bukan ketergantungan, melainkan keberlanjutan pembangunan. Pengembangan kapasitas masyarakat berlangsung melalui proses belajar sosial secara kumulatif. Dari pengalaman bekerja sambil belajar diperoleh gagasan kreatif, pola aktivitas bersama yang melembaga dan pengetahuan lokal. Pola aktivitas bersama yang merupakan institusi sosial dan pengetahuan lokal ini semakin berkembang melalui pengolahan umpan balik. Berbagai praktik pelaksanaan pembangunan yang dikelola masyarakat sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya baik yang bersifat *good* maupun *bad practices*, digunakan sebagai referensi untuk melakukan penyempurnaan. Proses tersebut berlangsung melalui rutinitas kehidupan masyarakat dalam kehidupan keseharian.

4. Kesimpulan

Intervensi komunitas terhadap Lembaga Masyarakat Desa Konservasi (LMDHK) dilakukan secara *participatory research* dengan melakukan tahapan: i) Assessment; ii) Perencanaan Alternatif Program; iii) Pemformulasian Rencana Aksi; iv) Pelaksanaan (Implementasi Program); v) Monitoring Dan Evaluasi; dan vi) Terminasi. Terminasi dilakukan karena bukan masyarakat sudah dapat dianggap “mandiri” tetapi karena program atau kegiatan yang dilakukan sudah harus dihentikan. Pengembangan kapasitas LMDHK “Womo Mulyo” dilakukan dengan proses membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat.

Pustaka

- Anonim, 2015. *Roadmap Pencapaian IKK Pembinaan Desa Penyangga Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019*. Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Adimihardja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2003. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Humaniora. Bandung
- Aman. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Disampaikan dalam Acara Pengabdian Kepada Masyarakat di Islam Gamping Sleman, 29 Juli 2011
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Karsidi, Ravik. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil*. Disampaikan dalam Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Otoda. Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng. Semarang 4-6 Juni
- Kartodihardjo, Hariadi. 2006. Masalah Kapasitas Kelembagaan dan Arah Kebijakan Kehutanan: Studi Tiga Kasus. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Volume XII No 3: 14-25 (2006).
- Nasrul, Wedy. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. *Jurnal MENARA Ilmu*. Vol.III No. 29, Juni 2012. ISSN 1693-2617. LPPM UMSB.
- Mayo, Virginia. 1994. “Community Work”. In ChristophernHanvey and Terry Philpot (eds). *Practising Social Work*. London Routledge

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode Metode Baru. Universitas Indonesia. Jakarta
- Rukminto, Isbandi Adi. 2012. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suradisastra, Kedi. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 26 No. 2. Desember 2008: 82-91.
- Tampubolon, Mangatas. 2001. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Online*. Jakarta: Depdiknas Volume 32, November.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta